

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja organisasi sektor publik menjadi salah satu hal yang seringkali disoroti, dikarenakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap organisasi pemerintahan dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kinerja pemerintahan terkadang menjadi salah satu pertanyaan besar yang muncul pada masyarakat, mengenai bagaimana efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Anggaran yang cukup besar menjadi salah satu pemicu yang memunculkan pertanyaan mengenai kinerja, apakah anggaran yang besar sebanding dengan kinerja pemerintahan dan bagaimana pula pemerintah mengelola anggaran tersebut sehingga anggaran yang dibutuhkan dapat terealisasi dengan baik. Kinerja organisasi sektor publik atau organisasi perangkat daerah tidak dapat hanya dengan melihat hasil kerja, tetapi juga perlu adanya pengukuran dari segi keuangan.

Pengukuran kinerja akan menunjukkan bagaimana kredibilitas suatu organisasi dan juga sebagai evaluasi efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan inilah yang menjadi salah satu usaha bagi suatu organisasi atau lembaga untuk melihat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan. Kinerja keuangan merupakan keahlian yang dimiliki oleh suatu organisasi/kelompok untuk menilai seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan suatu modal (Munawir, 2011:50). Mengingat besarnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk setiap kegiatan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga kinerja suatu

Organisasi Perangkat Daerah menjadi salah satu hal yang disoroti. Apakah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah terealisasi dengan baik atau tidak. Melihat banyaknya anggaran tersebut, yang terkadang didalamnya terdapat banyak kebocoran dana, pemborosan, bahkan seringkali inefisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat melihat tidak hanya sekedar hasil nyata yang tergambarkan melainkan bagaimana anggaran tersebut dikelola, apakah cukup ekonomis, efisien dan efektif atau tidak. Hal ini yang menjadi dasar dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan untuk dapat menilai penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti *Balanced Scorecard* dan Konsep *Value For Money*. *Balanced Scorecard* ialah teknik pengukuran kinerja yang banyak dikembangkan dan komprehensif, berdasarkan aspek keuangan dan non-keuangan. *Balanced Scorecard* yang bisa menilai dari aspek kuantitatif-keuangan dan aspek kualitatif non-keuangan dinilai cocok digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik. Akan tetapi, *Balanced Scorecard* yang memiliki banyak pengukuran kinerja yang digunakan menjadikan hal ini sebagai kelemahan dari metode ini. Banyaknya pengukuran yang digunakan akan menghilangkan suatu fokus, sehingga akan sulit mencapai suatu keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan metode *Balanced Scorecard*.

Konsep *Value for Money* yaitu salah satu alat dalam mengukur kinerja keuangan yang digunakan oleh sektor publik untuk bisa digunakan dalam mengukur berdasarkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu

aktivitas. Konsep ini dapat menggambarkan apakah bagi masyarakat penggunaan dana anggaran yang dikeluarkan dapat memberi hasil suatu nilai tertentu atau tidak. Konsep *Value for Money* bukan hanya meninjau dari sisi finansial melainkan juga dari sisi non finansial. Dengan penggunaan konsep ini, akan dapat membantu suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan kesadaran akan uang publik yang diperoleh sebagai anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan akuntabilitas publik, serta dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara ekonomis dan efisien.

Berdasarkan penjelasan mengenai kedua alat pengukuran kinerja keuangan diatas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan Konsep *Value for Money* sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan. Mengingat penelitian dilakukan pada suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam pelaksanaan kegiatannya memusatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan peternak yang ada di Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengukuran kinerja yang mana dalam penggunaan konsep ini hanya akan merujuk pada tiga elemen pengukuran kinerja, yaitu ekonomi, efisien dan efektif. Tuntutan masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran terhadap sumber daya dapat dilakukan secara hemat dalam hal pengadaan dan alokasi, sehingga dapat meminimalkan dalam hal penggunaannya, yang akan tetap mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan dan target sasaran. Maka peneliti tertarik dalam membahas kinerja keuangan yang akan dituangkan sebagai suatu penelitian dengan judul "PENERAPAN KONSEP *VALUE FOR*

MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam pokok pembahasan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan diukur dari sisi ekonomi dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana kinerja keuangan diukur dari sisi efisiensi dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana kinerja keuangan diukur dari sisi efektivitas dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari sisi ekonomi dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari sisi efisiensi dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari sisi efektivitas dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah serta memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam akuntansi khususnya mengenai kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Konsep *Value for Money* pada organisasi pemerintahan, serta dapat menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan juga kepentingan perpustakaan dalam matakuliah akuntansi sektor publik khususnya dalam pengukuran kinerja keuangan.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk belajar dalam melakukan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi yang benar sesuai dengan ketentuan dan pedoman penulisan skripsi, serta dapat memperluas ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa studi.

3. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk membantu organisasi sektor publik khususnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperbaiki kinerja serta dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk program kegiatan kedepannya dan pengalokasian sumber daya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.